

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Manusia pada hakekatnya adalah makhluk sosial (*homo socius*). Entitas manusia sebagai makhluk sosial mengharuskan manusia berelasi dengan sesama ciptaan yang lain. Di sini dapat dikatakan bahwa perempuan selalu berelasi dengan laki-laki, dan sebaliknya laki-laki berelasi dengan perempuan. Selain memiliki hubungan relasional, manusia juga tidak terlepas dari problem-problem sosial yang dipengaruhi budaya. Dalam hal ini, secara eksplisit penulis menggagas budaya patriarki yang dapat merugikan salah satu jenis kelamin tertentu. Tidak bermaksud mengklaim budaya patriarki sebagai budaya yang tidak baik, tetapi praktiknya yang cenderung menguntungkan atau mengutamakan peran laki-laki membuatnya menjadi perhelatan atau perdebatan panjang dalam masyarakat yang belum juga usai.

Budaya patriarki merupakan budaya yang mementingkan peran laki-laki di setiap sendi kehidupan. Praktik budaya patriarkat seringkali menjadikan perempuan sebagai korban ketidakadilan. Perempuan acapkali mengalami tekanan hidup, baik secara fisik maupun psikologis. Selain itu, praktik budaya patriarki, bisa membawa perbedaan, pengabaian, dan pembatasan hak terhadap perempuan. Perempuan kurang diberi hak politik penuh, akibat budaya patriarki yang masih melekat dalam masyarakat. Perbedaan peran dan posisi akibat budaya patriarki secara tidak langsung menguntungkan laki-laki dan merugikan pihak perempuan. Ironisnya, praktik demikian telah berlangsung lama dan mengakar dalam masyarakat. Masyarakat justru melihat budaya patriarki sebagai salah satu tradisi yang diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang. Karena tradisi, masyarakat menjaga budaya patriarki,

walaupun kenyataannya membelenggu perempuan sebagai makhluk yang ingin berpolitik.

Peran perempuan dalam masyarakat dan budaya patriarki merupakan persoalan panjang yang belum selesai diperbincangkan. Lembaga advokasi dan pembela hak perempuan terus bersuara untuk meningkatkan partisipasi aktif perempuan dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Namun, di tengah gencarnya perjuangan itu, masih banyak kasus atau problem yang muncul atas nama perempuan. Di antaranya adalah penjualan perempuan, pemerkosaan dan lain sebagainya. Sementara itu, dalam dunia politik, perempuan belum mempunyai akses yang cukup. Rendahnya partisipasi politik perempuan disebabkan pelbagai hal. Salah satunya adalah minimnya ruang yang diberikan partai politik untuk perempuan dalam dunia politik. Selain itu, minat kaum perempuan untuk terjun dalam dunia politik juga sangat rendah. Kalaupun ada perempuan yang ingin berkiprah dalam dunia politik, keluarga tidak membuka ruang kebebasan atau tidak memberi izin kepada mereka. Pada dasarnya hal ini sangat menyedihkan bagi perempuan, di mana haknya dibatasi oleh kehendak atau keinginan keluarga.

Terlepas dari itu, perjuangan kaum perempuan dalam dunia perpolitikan Indonesia telah memberi pencerahan. Perempuan turut mengambil bagian dalam kemajuan bangsa dengan segala kemampuan yang dimilikinya. Namun, di Manggarai khususnya Kecamatan Cibal Barat, kiprah perempuan dalam dunia politik sampai saat ini masih dinilai rendah. Bahkan belum ada perempuan yang mencalonkan diri untuk menjadi pemimpin. Laki-laki kian banyak menghiasi kursi parlemen sedangkan perempuan jauh dari harapan. Terhambatnya langkah politik perempuan pada umumnya dipengaruhi oleh beragam faktor, baik faktor internal yang berasal dari dalam diri perempuan itu sendiri maupun faktor eksternal yang timbul dari persepsi masyarakat dan juga budaya patriarki. Sementara itu, masyarakat juga masih terpasung oleh ideologi-ideologi yang memojokkan kaum perempuan, sehingga perempuan selalu dinomorduakan. Budaya patriarki juga belum memberikan ruang yang cukup bagi perempuan untuk bersanding dengan laki-laki dalam kehidupan

sosial-kultural. Selain itu, minimnya pengetahuan masyarakat tentang politik mengakibatkan timbulnya anggapan-anggapan negatif yang merugikan perempuan. Kenyataan inilah yang menjadi alasan dasar rendahnya partisipasi politik perempuan di Kecamatan Cibai Barat Kabupaten Manggarai. Di satu sisi, pengetahuan dan minat perempuan dalam dunia politik sangat rendah. Di sisi lain, partai politik yang merupakan alat transportasi politik kurang mengakomodasi perempuan untuk terjun di dunia politik. Adanya kenyataan seperti ini, karena dipengaruhi oleh budaya patriarki.

Oleh karena itu, upaya-upaya yang disodorkan penulis dalam bab sebelumnya setidaknya dapat membantu meningkatkan partisipasi perempuan dalam dunia politik. Sementara itu, setiap orang mesti menyadari bahwa laki-laki dan perempuan adalah makhluk sosial yang sederajat, yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam masyarakat. Artinya, semua manusia itu sama tidak ada yang lebih utama dan lebih berkuasa dalam setiap sendi kehidupan. Berkaitan dengan ini, baik dalam budaya maupun dalam dunia politik, perempuan dan laki-laki selalu sama, tidak ada struktur penguasa dan yang dikuasai. Dengan demikian kehidupan sosial-kultural bukan lagi tentang kekuasaan laki-laki dan perempuan yang dikuasai, tetapi jauh daripada itu kehidupan sosial-kultural merupakan kehidupan manusia yang mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama.

5.2. USUL DAN SARAN

Perlu diingat bahwa persoalan rendahnya partisipasi politik perempuan di tengah budaya patriarki merupakan persoalan panjang yang belum juga usai. Persoalan rendahnya partisipasi politik perempuan tidak akan pernah sampai pada titik akhir apabila masyarakat masih terpasung dalam budaya patriarki. Hal inilah yang terjadi di Kecamatan Cibai Barat Kabupaten Manggarai, di mana masyarakat masih terpasung dalam budaya patriarki, sehingga partisipasi perempuan dalam dunia politik masih rendah. Oleh karena itu dibutuhkan kerja sama dari semua pihak di Kecamatan Cibai Barat untuk mendekonstruksi praktik patriarkat, sehingga

perempuan dengan bebas mengekspresikan dirinya sesuai dengan hak dan kewajiban dalam dunia politik. Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan di Kecamatan Cibai Barat. Kerja sama yang dimaksudkan di sini bukan sekedar menyampaikan pendapat, tetapi harus ada tindakan nyata. Berkaitan dengan ini, peran pelbagai pihak, seperti pemerintah Kecamatan Cibai Barat, masyarakat Kecamatan Cibai Barat, keluarga, lembaga akademis, kaum perempuan, lembaga adat dan dari Gereja sangatlah penting.

5.2.1 Pemerintah Kecamatan Cibai Barat

Pemerintah sebagai pemegang aturan terkait dengan tata kehidupan sosial-masyarakat mesti melakukan sosialisasi tentang kesetaraan gender di lingkungan sekolah-sekolah dan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga mesti mempertegas pengaplikasian peraturan undang-undang tentang keterwakilan perempuan dalam parlemen, sehingga peluang perempuan untuk masuk ke dalam kursi parlemen semakin luas. Lewat tulisan ini, penulis mau mengusulkan agar pemerintah Kecamatan Cibai Barat harus terbuka dan lebih mempertegas lagi konsep kesetaraan gender dalam masyarakat, sehingga perempuan tidak dipandang sebagai pengabdikan laki-laki melainkan juga sebagai mitra kerja yang mempunyai elektabilitas dan kemampuan yang sama sebagaimana yang dimiliki laki-laki. Pemerintah Kecamatan Cibai Barat hendaknya berpijak pada asas keadilan dan konsisten dalam memantau masalah yang terjadi dalam masyarakat.

5.2.2 Masyarakat Kecamatan Cibai Barat

Masyarakat merupakan komunitas sosial yang sangat besar. Dalam masyarakat, orang bebas mengekspresikan diri, namun kebebasan itu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Masyarakat juga memiliki peran penting untuk mempertahankan budaya-budaya yang telah diwariskan oleh para leluhur, maka dari itu masyarakat mengambil peran penting dalam proses penyelesaian masalah pamarjinalan perempuan dari ranah publik khususnya dalam dunia politik. Masyarakat mesti memberi kebebasan bagi kaum perempuan untuk mengekspresikan

dirinya secara utuh tanpa adanya belenggu budaya patriarki. Selain itu, stereotip negatif tentang perempuan yang dibangun oleh masyarakat itu sendiri perlu ditinjau kembali.

5.2.3 Keluarga

Keluarga merupakan bagian kecil dari masyarakat. Dalam keluarga, seseorang dibentuk dan dididik menjadi manusia yang mampu berpikir serta bertanggungjawab dengan hidupnya. Dapat dikatakan bahwa keluarga merupakan pendidikan awal bagi seseorang sebelum mengenal dunia luar. Berkaitan dengan ini, pendidikan yang diterapkan dalam keluarga secara langsung bisa memberikan pengaruh dalam tingkah laku seorang anak di dunia luar. Jika dalam keluarga, sejak kecil orang diajarkan nilai patriarkat maka apa yang didapatkannya akan mengakar dalam dirinya. Oleh karena itu, untuk meningkatnya kesetaraan gender dalam masyarakat dan meredupkan nilai patriarkat mesti ada pembenahan dari keluarga terlebih dahulu. Keluarga harus mengajar kepada anak-anak nilai-nilai budaya yang tidak merugikan jenis kelamin tertentu dan mengedepankan kesetaraan gender. Selain itu, keluarga juga harus memberikan kebebasan kepada anak-anak sesuai dengan hak dan kewajibannya.

5.2.4 Lembaga Pendidikan

Lembaga pendidikan merupakan institusi resmi negara yang dibangun untuk kepentingan masyarakat umum. Setiap lembaga pendidikan diharapkan untuk menerapkan pendidikan karakter dan budi pekerti mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Model pendidikan seperti ini akan membantu menumbuhkembangkan setiap pribadi atas sikap yang baik dan bertanggungjawab dalam segala hal serta sikap menghargai orang lain. Selain itu, pendidikan karakter dan budi pekerti mesti diberikan sejak dini kepada anak-anak, sehingga tercipta pemahaman dan pola pikir serta tingkah laku yang sesuai. Selain memberikan pendidikan karakter, pendidik juga mesti memperlakukan anak-anak secara setara dalam lembaga pendidikan. Dengan demikian praktik patriarkat dan bias gender dalam masyarakat akan terhindar dari benak anak-anak. Oleh karena itu, pendidik

sebagai tokoh sentral untuk memberikan bekal kepada peserta didik mesti menjalankan perannya dengan baik, sehingga karakter dan cara berpikir mereka terarah pada tujuan yang sejati.

5.2.5 Kaum Perempuan

Kaum perempuan bertanggungjawab untuk meningkatkan harkat dan martabatnya dalam masyarakat. Perempuan mesti berjuang dan tidak membiarkan diri terbelenggu oleh budaya patriarki. Selain itu, kaum perempuan mesti menyadari bahwa keberadaannya sebagai manusia tidak terlepas dari hak dan kewajiban kodratnya. Hak dan kewajiban ini menjadi dasar bagi perempuan untuk berpijak dan memberanikan diri untuk berekspresi dengan bebas dalam kehidupan sosial-masyarakat. Selain daripada itu, perempuan juga mesti saling mendukung antara satu dengan yang lain. Misalnya, ada perempuan yang mencalonkan diri menjadi pemimpin, sesama perempuan mesti saling mendukung, sehingga kesetaraan gender dalam dunia politik semakin meningkat dan tekanan budaya patriarki serta stereotip negatif masyarakat tentang mereka menjadi sesuatu yang perlu ditinjau ulang.

5.2.6 Lembaga Adat

Lembaga adat memiliki peran penting untuk mempertahankan budaya-budaya yang telah diwariskan oleh para leluhur, maka lembaga adat mengambil peran penting dalam proses peningkatan harkat dan martabat perempuan dalam masyarakat. Lembaga adat juga harus memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam setiap sendi kehidupan. Tidak ada yang lebih berkuasa dan yang dikuasai. Laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kebebasan yang sama dalam kehidupan sosial-masyarakat termasuk dalam dunia politik.

5.2.7 Gereja Katolik Keuskupan Ruteng

Gereja merupakan institusi sosial yang mempunyai perhatian khusus dalam hidup manusia. Gereja juga berperan dalam menata kehidupan sosial umat beragama Kristen. Selain itu, Gereja berperan aktif dalam meningkatkan harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu, Gereja mesti keluar dari tradisi masa lalu yang lebih mementingkan laki-laki dan mulai merekondisi sesuatu yang baru, yaitu kesetaraan gender. Gereja mesti berjuang untuk meningkatkan kesetaraan gender dalam kehidupan sosial masyarakat, secara khusus dalam dunia politik. Dalam Gereja itu sendiri perlu memperhatikan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

I. KAMUS, UNDANG-UNDANG DAN DOKUMEN

Bagus, Lorens. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia, 1996.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai. *Kecamatan Cibal Barat dalam Angka 2019*. Ruteng: BPS Kabupaten Manggarai, 2019.

Pusat data Kantor Kecamatan Cibal Barat, pada 4 Januari 2021.

PT Cipta Adi Pustaka. *Ensiklopedi Nasional Indonesia*. Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka, 1990.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD.

United Nations Development Programme (UNDP). *Partisipasi Perempuan dalam Politik dan Pemerintah*. Jakarta: UNDP Indonesia, 2010.

II. BUKU-BUKU

Adenay, Bernard T. *Etika Sosial Lintas Budaya*. Yogyakarta: Kanisius, 2000.

Ahmadi, Abu. *Psikologi Sosial*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1982.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

De Beauvoir, Simone. *The Second Sex*. New York: Vintage Books, 1974.

Fadillah, Putra. *Partai Politik dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003.

- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Greertz, Hildred dan Clifford Greertz. *Kinship in Bali*. Chicago: University of Chicago Press, 1975.
- Hylland Eriksen, Thomas. *Antropolgi Sosial dan Budaya: Sebuah Pengantar*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2009.
- Lilijawa, Isidorus. *Perempuan, Media dan Politik*. Maumere: Ledalero, 2010.
- Marion Young, Iris. *Throwing Like a Girl and Other Essays in Feminist Philosophy and Social Theory*. Bloomington: Indiana UP, 1990.
- Marijan, Kacung. *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mies, Maria. *Patriarchy and Accumulation on a World Scale: Women in the International Division of Labor*. Avon: The Bath Press, 1986.
- Millet, Kate. *Sexual Politics*. Chicago: University of Illinois Press, 2000.
- O Blood, Robert and Donal M. Wolfe. *Husbands and Wives, the Dynamic of Married Living*. London: The Free Press, 1960.
- Oetama, Jakob. *Demokrasi, Kekerasan, Disintegrasi: Merangsang Pemikiran Ulang Keindonesiaan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001.
- Raho, Bernard. *Sosiologi*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2016.
- Rasyidin dan Fidhia Aruni. *Gender dan Politik*. Sulawesi: Unimal Press, 2016.
- Sulistyo, Budi, Jodie Perdanakusuma, dan Ninok Leksono. *MDGs (Millenium Development Goals) Sebentar lagi. Sanggupkah Kita Menghapus Kemiskinan di Dunia?* Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010.
- Teobaldus Deki, Kanisius. *Tradisi Lisan Orang Manggarai: Membedik Persaudaraan dalam Bingkai Sastra*. Jakarta: Parrhesia Institute Jakarta, 2011.
- Walby, Sylvia. *Theorizing Patriarchy*. London: Wiley-Blackwell, 1990.
- Whani Wicaksana, Anom. *Raden Ajeng Kartini: Perempuan Pembawa Cahaya untuk Bangsa*. Sleman Yogyakarta: C-Klik Media, 2018.

III. ARTIKEL

- Aisyah, Nur. "Relasi Gender dalam Institusi Keluarga (Pandangan Teori Sosial dan Feminis)". *Muwazah*, Vol 5, No. 2, Desember 2013.
- Amaliyah Achmad, Isyrofah. "Penguatan Keterwakilan Perempuan dalam Kepengurusan Partai Politik". *Jurist-Diction*, Vol. 1, No. 1, September 2018.
- Aman, Luis. "Perempuanku Sayang Perempuanku Malang: Adat Belis di NTT dan Tantangan Emansipasi Perempuan". *Jurnal Ledalero*, vol. 6, No. 2. Ledalero, Juni 2009.
- Hadiz, Liza. "Partisipasi dan Kesetaraan: Politik Gender dalam Pembangunan", dalam Liza Hadiz (ed.). *Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2004.
- Haryatno, Rudi. "Problematika Peran Perempuan dalam Ruang Demokrasi". *Gita Sang Surya*, Vol. 13, No. 6, November-Desember 2018.
- Hasanah, Ulfatum. "Gender dalam Dakwah untuk Pembangunan (Potret Keterlibatan Perempuan dalam Politik)". *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 38, No. 2, Juli-Desember 2018.
- Iman Subono, Nur. "Menuju Representasi Politik Perempuan yang lebih Bermakna". *Jurnal Sosial Demokrasi*, Edisi 6, Tahun 2, Juni-Agustus 2009.
- Kurniawan, Nalom. "Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 4, Desember 2014.
- Labi Waleng, Petrus. "Partisipasi Warga Negara Demokrasi menuju *Bonum Commune*". *Akademika*, Vol. 5, No. 1, 2008/2009.
- Lambertus Kollo, Fredik. "Budaya Patriarki dan Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik", dalam Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III, 11 November 2017, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta.
- Lanur, Alex. "Pandangan Hidup Orang Manggarai", dalam Martin Chen dan Charles Suwendi (ed.). *Iman, Budaya, dan Pergumulan Sosial*. Jakarta: Penerbit Obor, 2012.

- Lestari, Dian. “Eksistensi Perempuan dalam Keluarga (Kajian Peran Perempuan sebagai Jantung Pendidikan Anak)”. *Muwazah*, Vol. 8, No. 2, Desember 2016.
- Leteng, Hubertus. “Sambutan Satu Abad Gereja Manggarai-Flores”, dalam Max Regus dan Kanisius Teobaldus Deki (ed.), *Gereja Menyapa Manggarai*. Jakarta: Parrhesia Institute, 2011.
- Mukarom, Zaenal. “Perempuan dan Politik: Studi Komunikasi Politik tentang Keterwakilan Perempuan di Legislatif”. *Mediator*, Vol. 9, No. 2, Desember 2008.
- Nimrah, Siti dan Sakaria. “Perempuan dan Budaya Patriarki”. *Journal The Politics*, Vol.1, No. 2, Juli 2015.
- Nurmila, Nina. “Pengaruh Budaya Patriarki terhadap Pemahaman Agama dan Pembentukan Budaya”. *Karsa*, Vol. 23. No. 1, Juni 2015.
- Ottor, Sulaiman. “Perempuan Tangguh Penyuar Kebenaran”. *Gita Sang Surya*, Vol. 14, No. 2, Maret-April 2019.
- Pandor, Pius. “Menyibak Praksis *Lonto Léok* dalam Demokrasi Lokal Manggarai”, dalam Armada Riyanto, dkk. (eds.), *Kearifan Lokal-Pancasila: Butir-Butir Filsafat Ke-Indonesiaan*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2015.
- Prastyananda Yuwono, Nurbaity. “Perempuan dalam Kungkungan Budaya Politik Patriarki”. *Muwazah*, Vol. 10, No. 2, 2018.
- Pudji Astuti, Tri Marhaeni. “Citra Perempuan dalam Politik”. *Jurnal Yin Yang: Studi Gender dan Anak*, Vol. 1, No. 3, Januari-Juli 2008.
- Putri Budiarti, Aisah. “Bayang-Bayang Afirmasi Keterwakilan Perempuan di Parlemen Indonesia”. *Jurnal Studi Politik*, Vol.1, No.2, 2011.
- Sidik Iriansyah, Herinto. “Tantangan dan Peluang Perempuan dalam Berpolitik di Indonesia (Masyarakat Patriarkat)”, dalam Seminar *Peningkatan Kapasitas Perempuan di Lembaga Politik*, STKIP Kusuma Negara bekerjasama dengan Kesbangpol DKI, 20 September 2016.
- Tan G., Mely. “Wanita Indonesia: Menuju Cakrawala Baru?” dalam Liza Hadiz, *Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2004.

Wahyudi, Very. "Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender". *Jurnal Politik Islam*, Vol.1, No. 1, Januari-Juni 2018.

Yusalia, Henny. "Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Tantangan Budaya Patriarki". *Wardah*, No. XXVIII, Th. XV, Desember 2014.

IV. SKRIPSI

Aman, Konstantinus. "Rekonstruksi Gender sebagai Upaya Memerangi Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan di NTT". Skripsi, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2018.

Panjaitan F., Mike Elisabeth. "Upaya Partai Politik dalam Memenuhi *Affirmative Action* Calon Legislatif pada Pemilihan Legislatif 2014 di Kota Surabaya". Skripsi Sarjana, Universitas Airlangga, 2015.

V. INTERNET

Amarseto, Binuko. "Budaya Patriarki dan Kekerasan terhadap Perempuan", dalam <http://decungkringo.wordpress.com/budaya-patriarki-dan-kekerasan-terhadap-perempuan.html>, diakses pada 20 Oktober 2020.

Budiman Nasu, Konradus. "Perempuan dalam Ranah Politik NTT", dalam <http://thecolumnist.id/artikel/perempuan-dalam-ranah-politik-ntt---456#>, diakses pada 20 September 2020.

Lewokeda, Aloysius. "12 Perempuan Menghiasi Wajah Baru DPRD NTT periode 2019-2024", dalam <http://kupang.antaranews.com/amp/berita/223992/12-perempuan-menghiasi-wajah-baru-dprd-ntt--periode-2019-2024>, diakses pada 30 Oktober 2020.

Nurul Hidayah, Siti. "Keterwakilan Perempuan dalam Politik", <https://news.detik.com/kolom/d-4174432/keterwakilan-perempuan-dalam-politik>, diakses pada 17 Maret 2020.

Qomariyah Pramisti, Nurul. "Kuota 30% Perempuan di Parlemen Belum Pernah Tercapai", dalam <https://tirto.id/kuota-30-perempuan-di-parlemen-belum-tercapai-cv8q>, diakses pada 18 Maret 2020.

Rastika, Icha. "Perludem: Keterwakilan Perempuan dalam Pileg 2019 Terbanyak Sepanjang Sejarah".

<<https://nasional.kompas.com/read/2019/08/30/22105001/perludem-keterwakilan-perempuan-dalam-pileg-2019-terbanyak-sepanjang-sejarah.html>>.

[T. P.]. “Patriarki”. dalam [http://: en. wikipedia/wiki/Patriarchy](http://en.wikipedia/wiki/Patriarchy), diakses pada 13 Oktober 2020.

Werlhof Von, Claudia. “Capitalist Patriarchy and the Struggle for a Deep Alternative”, makalah dipresentasikan dalam Konferensi Internasional bertajuk *A radically different world view is possible. The gift-economy inside and outside Patriarchal Capitalism*, Las Vegas, USA, 13th-14th of November 2004, dalam [http:// uuhome.de/ global/ downloads/Las Vegas.pdf.](http://uuhome.de/global/downloads/LasVegas.pdf), diakses pada 15 Oktober 2020.

VI. WAWANCARA

Berahi, Yustus. Wawancara, 3 Januari 2021.

Dahe, Vilomena. Wawancara, 29 Desember 2020.

Daliman, Elisabet. Wawancara, 8 Januari 2021.

Damianus. Wawancara, 29 Desember 2020.

Dama, John. Wawancara, 5 Januari 2021.

Dandung, Vinsensius. Wawancara, 2 Januari 2021.

Dembok, Nikolaus. Wawancara, 5 Januari 2021.

Dias, Paulina. Wawancara, 7 Januari 2021.

Fatima, Walburga. Wawancara, 4 Januari 2021.

Iba, Veronika. Wawancara, 4 Desember 2021.

Imun, Retiana. Wawancara, 11 Januari 2021.

Jedarut, Yohanes. Wawancara, 27 Desember 2020.

..... Wawancara, 28 Desember 2020.

Jehaut, Ferdi. Wawancara, 28 Desember 2020.

Jehaman, Lukas. Wawancara, 29 Desember 2020.

Jehati, Yoakim. Wawancara, 4 Januari 2021.

..... Wawancara via telepon, 19 Februari 2021.

John, Daniel. Wawancara, 13 Januari 2021.

Kaon, Rofinus. Wawancara, 2 Januari 2021.

Lawang, Stefanus. Wawancara, 13 Januari 2021.
Londas, Vinsen. Wawancara, 20 Desember 2020.
Mamung, Lusiana. Wawancara, 6 Januari 2021.
Mamus, Sovia. Wawancara, 5 Januari 2021.
Mansur, Largus. Wawancara, 13 Januari 2021.
Mariana, Yolenta. Wawancara, 3 Januari 2021.
Mbejok, Tadeus. Wawancara, 13 Januari 2021.
Merlina, Rena. Wawancara, 10 Januari 2021.
Mimun, Kristina. Wawancara, 29 Desember 2020.
Minggu, Vinsen. Wawancara, 22 Desember 2020.
Nampung, Marselinus. Wawancara, 7 Januari 2021.
Panjung, Wilibrodus. Wawancara, 3 Januari 2021.
..... Wawancara, 12 Januari 2021.
Papu, Matias. Wawancara, 2 Januari 2021.
Pongor, Sebastianus. Wawancara, 10 Januari 2021.
Pukang, Timoteus. Wawancara, 12 Januari 2021.
Rianti, Ratni. Wawancara, 4 Januari 2021.
Rindeng, Ratna. Wawancara, 28 Desember 2020.
Rentek, Maria. Wawancara, 7 Januari 2021.
Rogas, Simon. Wawancara, 8 Januari 2021.
Self, Bonefansius. Wawancara, 19 Desember 2020.
Son, Siprianus. Wawancara, 10 Januari 2020.
Sudirman, Paskalis. Wawancara, 30 Desember 2020.
Talu, Vitalis. Wawancara, 30 Desember 2020.
Tambut, Zakarias. Wawancara, 28 Desember 2020.
Tapung, Sebastian. Wawancara via telepon, 7 Januari 2021.
Tupa, Sebastian. Wawancara, 29 Desember 2021.
Yosefina. Wawancara, 29 Desember 2020.

LAMPIRAN

Untuk merealisasikan pertanyaan-pertanyaan berikut, penulis melakukan penelitian dan wawancara dengan narasumber-narasumber tertentu di Kecamatan Cibal Barat Kabupaten Manggarai. Hal ini dilakukan untuk mendukung tulisan ini sebagai karya ilmiah yang layak untuk dipublikasikan.

I. Pertanyaan-Pertanyaan Wawancara

1. Apa perbedaan peran perempuan dan laki-laki dalam masyarakat Cibal Barat?
2. Bagaimana relasi antara laki-laki dengan perempuan di tengah budaya patriarki Kecamatan Cibal Barat?
3. Apa itu politik menurut anda? Bila demikian, apakah perempuan bisa berpolitik?
4. Bagaimana citra politik perempuan dalam politik Manggarai khususnya Kecamatan Cibal Barat?
5. Apa saja yang menyebabkan rendahnya partisipasi politik perempuan di Kecamatan Cibal Barat?
6. Bagaimana struktur budaya yang berlaku di Kecamatan Cibal Barat?
7. Apakah penting bagi anda untuk berpartisipasi dalam dunia politik?
8. Bagaimana proses pembagian kerja antara perempuan dan laki-laki di Kecamatan Cibal Barat?
9. Apakah benar hambatan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam dunia politik dipengaruhi oleh budaya patriarki?
10. Apakah budaya melarang perempuan berpolitik? Bila ya, mengapa? Bila tidak, mengapa?

11. Sebagai perempuan, bagaimana anda melihat politik yang terjadi di Kecamatan Cibal Barat?
12. Bagaimana peran perempuan dalam masyarakat Manggarai khususnya di Kecamatan Cibal Barat?
13. Bagaimana realitas politik yang terjadi di Kecamatan Cibal Barat?
14. Berdasarkan pengamatan selama ini, bagaimana anda melihat politik yang terjadi di Kecamatan Cibal Barat?
15. Mengapa perempuan di Kecamatan Cibal Barat belum berani untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif?
16. Apakah anda setuju kaum perempuan Cibal Barat masuk politik, secara khususnya menjadi legislatif?
 - Bila setuju, apa alasan anda?
 - Bila tidak setuju, apa alasan anda?
17. Bila anda harus memilih antara caleg laki-laki atau caleg perempuan, manakah yang anda pilih?
 - Bila laki-laki, mengapa?
 - Bila perempuan, mengapa?

II. Nama-Nama Narasumber

1. Bonefansius Self umur 47 tahun selaku ketua BPD Desa Wae Codi.
2. Elisabet Daliman umur 35 tahun selaku pekerja bagian humas di Kantor Kecamatan Cibal Barat.
3. Damianus Awut umur 35 selaku pengajar Antropologi di SMA Negeri 2 Cibal.
4. Daniel John umur 50 tahun selaku tokoh masyarakat.
5. Ferdi Jehaut umur 35 tahun selaku anggota Partai Golkar.
6. Kristina Mimun umur 45 tahun selaku ibu rumah tangga.
7. John Dama umur 50 tahun selaku pengawas pemilu Kecamatan Cibal Barat.

8. Largus Mansur umur 39 tahun selaku anggota Partai PAN.
9. Lukas Jehaman umur 45 selaku tokoh masyarakat.
10. Lusiana Mamung umur 32 selaku ibu rumah tangga.
11. Marselinus Nampung umur 37 tahun selaku tenaga pengajar di SMA Negeri 2 Cibal.
12. Maria Rentek umur 30 tahun selaku tenaga pengajar di SMA Negeri 2 Cibal.
13. Matias Papu umur 30 tahun selaku tenaga pengajar di SMA Negeri 2 Cibal.
14. Nikolaus Dembok umur 60 tahun selaku kepala rumah adat kampung Cibal.
15. Paskalis Sudirman umur 48 tahun selaku anggota Partai PDI Perjuangan.
16. Ratna Rindeng umur 29 tahun selaku tenaga pengajar di SMA Negeri 2 Cibal.
17. Ratni Rianti umur 32 tahun tenaga kerja di Kantor Kecamatan Cibal Barat.
18. Rena Merlina umur 35 tahun selaku kepala dusun Raci.
19. Retiana Imun umur 40 tahun selaku ibu rumah tangga.
20. Paulina Dias umur 29 tahun selaku tenaga pengajar di SMA Negeri 2 Cibal.
21. Sebastianus Pongor umur 40 tahun selaku tokoh masyarakat.
22. Sebastian Tupa umur 42 tahun selaku tokoh masyarakat.
23. Sebastian Tapung umur 33 tahun selaku tokoh masyarakat.
24. Siprianus Son umur 45 tahun selaku tokoh masyarakat.
25. Simon Rogas umur 60 tahun selaku tokoh masyarakat.
26. Sovia Mamus umur 38 tahun selaku ibu rumah tangga.
27. Stefanus Lawang umur 32 tahun selaku tenaga pengajar di SDI Wae Paku.
28. Timoteus Pukang umur 39 tahun selaku tokoh masyarakat.
29. Tadeus Mbejok umur 43 tahun selaku mantan DPRD Kabupaten Manggarai.
30. Veronika Iba umur 35 tahun selaku pegawai di Kantor Kecamatan Cibal Barat.
31. Vilomena Dahe umur 30 tahun selaku tenaga pengajar di SMP Negeri 2 Cibal.
32. Vinsen Londas umur 40 tahun selaku ketua kelompok tani Sekecamatan Cibal Barat.

33. Vinsensius Dandung umur 52 selaku mantan Kepala Desa Wae Codi priode 2010-2015.
34. Vinsen Minggu umur 50 tahun selaku mantan Kepala Desa Wae Codi priode 2015-2020.
35. Vitalis Talu umur 45 tahun selaku Kepala Desa Timbu.
36. Walburga Fatima umur 40 tahun selaku pegawai di Kantor Kecamatan Cibai Barat.
37. Wilibrodus Panjung umur 38 tahun selaku anggota Partai Nasdem.
38. Yoakim Jehati umur 40 tahun selaku DPRD Kabupaten Manggarai.
39. Yohanes Jedarut umur 53 tahun selaku pegawai Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
40. Yolenta Mariana umur 40 tahun selaku ibu rumah tangga.
41. Yosefina umur 40 tahun selaku ibu rumah tangga.
42. Yustus Berahi umur 54 tahun selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Cibai.
43. Zakarias Tambut umur 70 selaku kepala kampung Raci.